



Nomor : B-634/DJTPD.4/AI.01.01/11/2025

Jakarta, 26 November 2025

Lampiran : 5 (lima) lembar

Hal : Undangan Rapat

Kepada Yth.

(daftar terlampir)

di Tempat

Dalam rangka meningkatkan pengamanan *website* dan sistem elektronik instansi pemerintah (berdomain “go.id” dan “desa.id”) terhadap penyisipan konten perjudian, dimana selama November 2025 telah dikirimkan 229 e-mail notifikasi kepada pengelola *website* serta per 7 November 2025 terdapat 6.881 URL terdeteksi masih aktif, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat yang akan diselenggarakan pada :

Hari, tanggal : Rabu, 3 Desember 2025

Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : Hotel Harper MT Haryono, Cawang

Jl. MT Haryono St No.6-7 RT.1/RW.6, Cawang, Jatinegara, Jakarta Timur

Tautan Zoom : <https://s.komdigi.go.id/ZZpZ7>

Meeting ID : 962 0552 9848 (Pass Code: 264301)

Acara : Koordinasi teknis pengamanan dan penonaktifan temuan URL tersisipi konten perjudian pada situs web instansi pemerintah

Mengingat pentingnya kegiatan dimaksud, dimohon agar peserta dapat hadir tepat waktu. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdr. Aulia (081292920929).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Aplikasi Pemerintah Digital,

Yessi Arnaz F.

Lampiran Surat Undangan

Nomor : B-634/DJTPD.4/AI.01.01/11/2025

Tanggal : 26 November 2025

Daftar Pejabat/Pegawai Yang Diundang

Undangan Eksternal

1. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Dalam Negeri
2. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
3. Kepala Pusat Data dan Informasi Kejaksaan Agung
4. Kepala Pusat Data dan Informasi Lembaga Ketahanan Nasional
5. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah
6. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Riau
7. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan
8. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat
9. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Anambas
10. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Banggai
11. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Baru Bara
12. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bolaang Mongondow
13. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Boyolali
14. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Gorontalo Utara
15. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Katingan
16. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
17. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Klungkung
18. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman
19. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pandeglang
20. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Paser
21. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian/Lembaga di Seluruh Indonesia
22. Kepala Dinas Kominfo Provinsi/Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia

Narasumber

1. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
2. Basuki Suhardiman, PANDI/Institut Teknologi Bandung
3. Dinas Kominfo Kabupaten Kampar

Undangan Internal

1. Direktur Pengendalian Ruang Digital
2. Syamsul Arip, Ketua Tim Pembinaan JF Penata Kelola Informatika SPBE dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah, Dit. APD
3. Maykada Harjono, Dit. APD
4. Meutia Rahmatika, Dit. APD
5. Ghina Hidayani, Dit. APD
6. M. Anna Aulia, Dit. APD
7. Hutabarat. Yogi Andreas, Dit. APD
8. Natasia Nakita, Dit. APD
9. Alikha Cinintya Farhani, Dit. APD

Direktur Aplikasi Pemerintah Digital,

Yessi Arnaz F.

Lampiran Surat Undangan

Nomor : B-634/DJTPD.4/AI.01.01/11/2025

Tanggal : 26 November 2025

Susunan Acara

Waktu	Kegiatan	Keterangan
Rabu, 3 Desember 2025		
09.00 – 09.15	Pembukaan dan arahan	- Direktur APD - Ketua Tim JF SPBE dan Nama Domain
09.15 – 11.00	Koordinasi teknis pengamanan dan penonaktifan temuan URL tersisipi konten perjudian pada situs web instansi pemerintah: 1. Pengawasan dan penindakan konten-konten perjudian oleh Dit. PRD 2. Upaya memerangi judi online oleh BSSN 3. Pengelolaan dan pengamanan domain “desa.id” oleh Diskominfo Kab. Kampar 4. Penerapan <i>framework</i> keamanan siber untuk pengamanan sistem informasi instansi oleh Basuki Suhardiman 5. Pengawasan pemanfaatan nama domain pemerintah oleh Dit. APD	- Dit. PRD - BSSN - Diskominfo Kampar - PANDI/ITB - Dit. APD
11.00 – 12.00	Diskusi dan Penutup	Seluruh peserta

TERM OF REFERENCE (TOR)

a. PENDAHULUAN

Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menyebutkan bahwa SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada para pengguna, baik itu layanan administrasi pemerintahan maupun layanan publik. Untuk dapat mengakses layanan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD), maka diperlukan jaringan internet maupun sistem elektronik yang andal terhadap gangguan dan penyalahgunaan.

Salah satu isu yang mengemuka dalam penyelenggaraan layanan SPBE yaitu maraknya penyusupan konten-konten judi online pada situs web pemerintahan (berdomain “go.id” dan “desa.id”). Meskipun upaya pemberantasan judi *online* secara masif telah digaungkan pemerintah, tapi penyusupan terus terjadi berulang-ulang dan sulit dicegah. Kendala baik secara regulasi, teknis, dan non-teknis perlu dibahas bersama oleh pihak-pihak terkait, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital selaku registrar nama domain instansi pemerintah.

Sejalan dengan itu, Direktorat Pengendalian Ruang Digital (PRD) bersama Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital (APD) secara rutin melakukan pengawasan dan penindakan terhadap konten-konten negatif internet. Berdasarkan hasil patroli siber Dit. PRD selama bulan November 2025, telah dikirimkan 229 e-mail notifikasi kepada pengelola *website* atau sistem elektronik, serta per 7 November 2025 terdapat 6.881 URL terdeteksi masih aktif. Dari temuan URL tersebut, terlihat ada peningkatan penyisipan konten judi *online* di situs pemerintah desa berdomain “desa.id” yang saat ini berada dalam pengelolaan Dinas Kominfo setempat.

Sebagai contoh pengelolaan dan pengamanan nama domain dan sistem informasi untuk pemerintah desa, disampaikan studi kasus dari Dinas Kominfo Kabupaten Kampar. Untuk kalangan pemerintah sendiri, penerapan *framework* keamanan siber membutuhkan arsitektur keamanan berlapis, enkripsi *end-to-end*, serta mekanisme otentikasi kuat di semua titik interaksi (baik di sisi server maupun user). Selain juga

membangun kerangka regulasi adaptif yang merujuk standar global seperti ISO 27001, NIST dan GDPR agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Untuk itu maka dipandang perlu mengadakan rapat koordinasi bersama pihak-pihak terkait untuk membahas berbagai ancaman siber serta teknis pengamanan website dan sistem elektronik di K/L/D. Hal ini menjadi upaya bersama dalam peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah selaku institusi pelayanan publik.

b. TUJUAN

Rapat bertujuan untuk membahas teknis pengamanan dan penonaktifan temuan URL tersisipi konten perjudian pada situs web instansi pemerintah bersama pihak-pihak terkait, yaitu kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota yang membidangi urusan TIK, BSSN, Dit. PRD, Diskominfo Kab. Kampar, PANDI/ITB, serta Dit. APD selaku pengisi acara.

c. PESERTA KEGIATAN

Kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota yang membidangi urusan TIK (Pusdatin / Diskominfo), dengan prioritas pada instansi yang tersisipi konten perjudian melewati tenggat 3 x 24 jam dalam satu bulan terakhir.

d. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Rabu, Hotel Harper MT Haryono, Cawang

e. OUTPUT KEGIATAN

Hasil kegiatan berupa laporan hasil rapat dan rekomendasi teknis tindak lanjut pengamanan website dan sistem elektronik pada instansi pemerintah.